

A photograph of a modern building with a glass facade and a white section. A large, vibrant rainbow is visible in the sky above the building. The BPKP logo is also visible on the white part of the building's facade.

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 (*Unaudited*)

Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta



**LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER I TAHUN 2023
(UNAUDITED)**

**PERWAKILAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
D.I YOGYAKARTA
SEBAGAI
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023
TAHUN ANGGARAN 2022**

**NOMOR : LAP-302/PW12/1/2023
TANGGAL : 27 Juli 2023**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Yogyakarta, 27 Juli 2023

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Adi Gemawan



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Lampiran	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan Laporan Keuangan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis	7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	8
A.3. Basis Akuntansi	8
A.4. Dasar Pengukuran	9
A.5. Kebijakan Akuntansi	9
A.6. Program Prioritas Nasional	18
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	20
B.2. Belanja Negara	21
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	27
C.1. Aset Lancar	27
C.2. Aset Tetap	28
C.3. Aset Lainnya	32
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	32
C.5. Ekuitas	34
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	35
D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	35
D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	43
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	45
E.1. Ekuitas Awal	45
E.2. Surplus/(Defisit) LO	45
E.3. Transaksi Antar Entitas	45
E.4. Koreksi yang Menambah (Mengurangi) Ekuitas	45
E.5. Ekuitas Akhir	46
F. Pengungkapan Penting Lainnya	47
F.1. Informasi Dana Bantuan Kedinasan	47



DAFTAR TABEL**Halaman**

Tabel 1	: Perbandingan Realisasi PNBPN Semester I Tahun 2023 dan 2022	21
Tabel 2	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Semester I Tahun 2023	21
Tabel 3	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja Semester I Tahun 2023	22
Tabel 4	: Perbandingan Realisasi Belanja Semester I Tahun Anggaran 2023 dan 2022	23
Tabel 5	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Semester I Tahun Anggaran 2023	23
Tabel 6	: Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Semester I Th Anggaran 2023 dan 2022	24
Tabel 7	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Semester I Tahun Anggaran 2023	24
Tabel 8	: Perbandingan Realisasi Belanja Barang Semester I Tahun Anggaran 2023 dan 2022	25
Tabel 9	: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Semester I Tahun Anggaran 2023	25
Tabel 10	: Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester I Tahun Anggaran 2023 dan 2022	26
Tabel 12	: Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022	27
Tabel 13	: Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022	27
Tabel 14	: Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022	28
Tabel 15	: Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023	31
Tabel 16	: Rincian Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022	32
Tabel 17	: Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022	33
Tabel 18	: Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022	33
Tabel 19	: Rincian PNBPN Semester I Tahun 2023 dan 2022	35
Tabel 20	: Perbandingan Realisasi Pendapatan Operasional Semester I Tahun 2023 Menurut LO dan LRA	36
Tabel 21	: Rincian Beban Operasional Semester I Tahun 2023 dan 2022	36
Tabel 22	: Rincian Beban Pegawai Semester I Tahun 2023 dan 2022	37
Tabel 23	: Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pegawai Semester I Tahun 2023 Menurut LO dan LRA	37
Tabel 24	: Rincian Beban Persediaan Semester I Tahun 2023 dan 2022	38
Tabel 25	: Rincian Beban Barang dan Jasa Semester I Tahun 2023 dan 2022	39
Tabel 26	: Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa Semester I Tahun 2023 Menurut LO dan LRA	40
Tabel 27	: Rincian Beban Pemeliharaan Semester Tahun 2023 dan 2022	40
Tabel 28	: Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pemeliharaan Semester I Tahun 2023 Menurut LO dan LRA	41
Tabel 29	: Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester I Tahun 2023 dan 2022	42
Tabel 30	: Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester I Tahun 2023 dan 2022	42
Tabel 32	: Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I Tahun 2023 dan 2022	44
Tabel 33	: Perbandingan Realisasi Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I Tahun 2023 Menurut LO dan LRA	44



DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Keuangan Pokok dari Aplikasi Monsakti per 30 Juni 2023
 - A. Neraca Percobaan Saldo Awal
 - B. Neraca Percobaan Basis Kas
 - C. Neraca Percobaan Basis Akrua
 - D. Laporan Realisasi Anggaran
 - E. Neraca
 - F. Laporan Operasional
 - G. Laporan Perubahan Ekuitas
2. Laporan BMN dari Monsakti per 30 Juni 2023
 - A. Laporan Barang Persediaan
 - B. Laporan Barang Milik Negara di Neraca
 - C. Laporan Penyusutan Barang Milik Negara





PERWAKILAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
D.I. YOGYAKARTA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Semester I Tahun 2023 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta, 27 Juli 2023

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Adi Gemawan



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta Semester I Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 30 Juni 2023 adalah berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp21.507.501,00 atau 54,32% dari anggarannya sebesar Rp39.593.000,00

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp17.059.354.752,00 atau mencapai 51,39 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp33.198.565.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022.

Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp112.389.896.049,00 yang terdiri atas Aset Lancar sebesar Rp381.222.271,00, Aset Tetap (Neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp112.008.673.778,00 dan Aset Lainnya (Neto setelah akumulasi penyusutan/amortisasi) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.394.236.826,00 dan Rp109.995.659.223,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/(defisit) dari kegiatan operasional, surplus/(defisit) dari kegiatan non-operasional, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp21.232.867,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp19.820.639.090,00,



sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp19.799.406.223,00. Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar Rp4.465.530,00, sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp19.794.940.693,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp112.752.969.977,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp19.794.940.693,00, dikurangi koreksi yang menambah/mengurangi nilai ekuitas sebesar Rp.217.312,00 ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp17.037.847.251,00. Sehingga Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai Rp109.995.659.223,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.



I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

NO.	URAIAN	CATATAN	30 JUNI 2023			30 JUNI 2022 REALISASI
			ANGGARAN	REALISASI	% REAL THD ANGGA- RAN	
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	B.1.				
	■ Penerimaan Negara Bukan Pajak		39.593.000	21.507.501	54,32	72.266.801
	Jumlah Pendapatan		39.593.000	21.507.501	54,32	72.266.801
B	BELANJA	B.2.				
	■ Belanja Pegawai	B.2.1.	25.000.702.000	14.103.271.391	56,41	11.492.317.320
	■ Belanja Barang	B.2.2.	7.502.375.000	2.856.508.361	38,07	2.083.523.386
	■ Belanja Modal	B.2.3.	695.488.000	99.575.000	14,32	0
	Jumlah Belanja		33.198.565.000	17.059.354.752	51,39	13.575.840.706

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Adi Gemawan



II. NERACA

PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
NERACA
PER 30 JUNI 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	30 JUNI 2023	31 DES 2022
ASET			
ASET LANCAR			
	C.1.		
- Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.	120.000.000	0
- Piutang Bukan Pajak	C.1.2.	2.918.896	0
- Persediaan	C.1.3.	258.303.375	310.955.059
JUMLAH ASET LANCAR		381.222.271	310.955.059
ASET TETAP			
	C.2.		
- Tanah	C.2.1.	95.737.627.000	95.737.627.000
- Peralatan dan Mesin	C.2.2.	15.341.768.913	15.242.193.913
- Gedung dan Bangunan	C.2.3.	19.166.563.800	19.166.563.800
- Aset Tetap Lainnya	C.2.4.	141.551.981	141.551.981
- Akumulasi Penyusutan	C.2.5.	(18.378.837.916)	(17.791.795.463)
JUMLAH ASET TETAP		112.008.673.778	112.496.141.231
ASET LAINNYA			
	C.3.		
- Aset Tak Berwujud	C.3.1.	93.366.000	93.366.000
- Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2.	(93.366.000)	(93.366.000)
JUMLAH ASET LAINNYA		0	0
JUMLAH ASET		112.389.896.049	112.807.096.290
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	C.4.		
- Utang Kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	2.200.669.987	51.794.313
- Pendapatan Diterima Dimuka	C.4.2.	1.060.000	2.332.000
- Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	C.4.3.	72.506.839	0
- Uang Muka dari KPPN	C.4.4.	120.000.000	0
JUMLAH KEWAJIBAN		2.394.236.826	54.126.313
EKUITAS			
	C.5.		
- Ekuitas	C.5.	109.995.659.223	112.752.969.977
JUMLAH EKUITAS		109.995.659.223	112.752.969.977
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		112.389.896.049	112.807.096.290

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Adi Gemawan



III. LAPORAN OPERASIONAL

PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	30 JUNI 2023	30 JUNI 2022
KEGIATAN OPERASIONAL	D.1		
PENDAPATAN OPERASIONAL	D.1.1		
- Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1.1.1	21.232.867	21.829.785
Jumlah Pendapatan Operasional (D.1.1)	D.1.1	21.232.867	21.829.785
BEBAN OPERASIONAL	D.1.2		
- Beban Pegawai	D.1.2.1	16.236.831.378	13.252.586.325
- Beban Persediaan	D.1.2.2	112.687.483	193.267.684
- Beban Barang dan Jasa	D.1.2.3	1.218.533.040	1.071.697.181
- Beban Pemeliharaan	D.1.2.4	347.830.720	338.402.478
- Beban Perjalanan Dinas	D.1.2.5	1.317.931.328	655.729.654
- Beban barang utk diserahkan kpd masyarakat	D.1.2.6	0	263.998
- Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.1.2.7	586.825.141	617.601.713
Jumlah Beban Operasional (D.1.2.1 s.d. D.1.2.6)	D.1.2	19.820.639.090	16.129.549.033
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Opr (D.1.1–D.1.2)	D.1	(19.799.406.223)	(16.107.719.248)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.2		
SURPLUS /(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	D.2.1		
- Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.1.1	4.465.530	54.558.183
- Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.2.1.2	0	0
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya (D.2.1.1-D.2.1.2)	D.2.1	4.465.530	54.558.183
Surplus /(Defisit) dari Kegiatan Non Opr (D.2.1)	D.2	4.465.530	54.558.183
SURPLUS/(DEFISIT) – LO (D.1+D.2)		(19.794.940.693)	(16.053.161.065)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan.

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Adi Gemawan



IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	30 JUNI 2023	30 JUNI 2022
EKUITAS AWAL	E.1	112.752.969.977	113.762.937.483
SURPLUS/(DEFISIT) – LO	E.2	(19.794.940.693)	(16.053.161.065)
KOREKSI YANG MENAMBAH/(MENGURANGI) NILAI EKUITAS	E.3	(217.312)	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4		
- Ditagihkan ke Entitas Lain	E.4.1	17.059.354.752	13.575.840.706
- Diterima dari Entitas Lain	E.4.2	(21.507.501)	(72.266.801)
- Transfer Masuk	E.4.3	0	0
Jumlah Transaksi Antar Entitas		17.037.847.251	13.503.573.905
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS (E.2+E.3+E.4)		(2.757.310.754)	(2.549.587.160)
EKUITAS AKHIR (E.1+E.2+E.3+E.4)	E.4	109.995.659.223	111.213.350.323

Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Kepala Perwakilan,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Adi Gemawan



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Profil dan
Kebijakan Teknis*

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga pemerintah non kementerian, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah, BPKP berperan untuk membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi dan memberikan masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas internal pemerintah adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat memberikan nilai tambah kepada *stakeholder* dan *shareholder*. Dalam hal ini, BPKP berperan untuk meningkatkan proses *governance*, manajemen risiko dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, menyatakan BPKP berperan dalam mendukung akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Susunan organisasi dan pejabat pimpinan unit kerja di lingkungan BPKP D.I. Yogyakarta sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:



✚ Kepala Perwakilan	: Adi Gemawan
✚ Kepala Bagian Umum	: Bendo Prayogi
✚ Koordintor Pengawasan Bidang IPP	: Bambang Kardiono
✚ Koordinator Pengawasan Bidang APD	: Arzad
✚ Koordinator Pengawasan Bidang AN	: Jusup Partono
✚ Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi	: Ety Farida
✚ Koordinator Pengawasan Bidang P3A	: Ratna Wijihastuti
✚ Analis SDM Aparatur Ahli Muda	: Siti Akrojah
✚ Analis Pengelola Keuangan APBN Muda	: Syarifuddin
✚ Pengelola Pengad. Barang & Jasa Muda	: Rohmad Adi Siaman

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta Semester I Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) modul persediaan, modul asset tetap dan modul GLP (general ledger dan pelaporan). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Perwakilan BPKP D.I Yogyakarta menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis



akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Semester I Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh BPKP. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawasan Keuangan dan



Pembangunan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.



Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi diakui apabila telah timbul hak yang didukung



dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Piutang yang timbul dari perikatan, diakui apabila terdapat ada peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Tarif Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar Tagihan TGR.
- Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap meliputi seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang



- mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
 - Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
 - Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa Jalan, Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,



Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan 2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir, direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
- Pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu dicatat sebagai koreksi terhadap nilai aset yang bersangkutan pada saat pengembalian tersebut telah disetorkan ke Kas Negara.

*Penyusutan Aset
Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari



suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Barang Bercorak Kesenian)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

Piutang Jangka Panjang



- TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:



Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima dimuka, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. Pembelian Persediaan yang belum dibayar dari Kas Negara (belum terbit SP2D) diakui sebagai Belanja yang Masih Harus Dibayar pada tanggal Neraca.



b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

A.6. Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Nasional (RKP) tahun 2023 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022, pada Satuan Kerja Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing prioritas nasional adalah sebagai berikut: Prioritas Nasional VII memperkuat stabilitas polhukhankamdan transformasi pelayanan publik. Pelaksanaannya diantaranya melalui Program Prioritas Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan. Kegiatan prioritas Pengawasan Pembangunan. Dengan pagu mencapai Rp2.012.772.000 dan realisasinya sebesar Rp612.919.251 dengan rincian sebagai berikut:

Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	Persen (%)	Satuan output strategis	target	capaian output strategis	Persen (%)
UAG.U21)*	317.520.000	207.494.910	65,35	Laporan	8	5	70,00
UAG.U22)*	223.432.000	58.467.594	26,17	Laporan	7	3	50,00
UAG.U23)*	296.352.000	161.931.500	54,64	Laporan	6	3	59,00
UAG.U24)*	42.336.000	9.500.000	22,44	Laporan	1	0	50,00
UAG.U27)*	115.200.000	63.001.090	54,69	Laporan	2	1	59,00
UAG.U41)*	109.657.000	30.372.900	27,10	Laporan	2	1	54,00
UAG.U52)*	802.435.000	33.437.833	46,03	Laporan	7	3	50,00
UAG.U53)*	105.840.000	48.713.424	4,17	Laporan	4	2	52,00
Jumlah	2.012.772.000	612.919.251			37	18	

UAG.U21)*: Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor



Pembangunan Sumber Daya Manusia

- UAG.U22)*: Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Infrastruktur dan Konektivitas
- UAG.U23)*: Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi
- UAG.U24)*: Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan
- UAG.U27)*: Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Daerah
- UAG.U41)*: Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pengendalian Kecurangan
- UAG.U52)*: Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Pemerintah Daerah
- UAG.U53)*: Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pagu Anggaran Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta Tahun 2023 semula sebesar Rp33.200.875.000,00 dan telah dilakukan revisi sebanyak 5 kali menjadi Rp33.198.565.000,00. Adapun revisi tersebut antara lain berupa pengurangan pagu belanja pegawai dan penambahan pagu belanja barang dan pagu belanja modal.

Rincian pagu Pendapatan dan Belanja Perwakilan BPKP Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Anggaran tahun 2023 (Rp)			
	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total Anggaran Belanja
Anggaran Semula	25.950.303.000	7.150.572.000	100.000.000	33.200.875.000
Penambahan	(949.601.000)	351.803.000	595.488.000	(2.310.000)
Anggaran Akhir	25.000.702.000	7.502.375.000	695.488.000	33.198.565.000

Sedangkan apabila dilihat dari program, maka perubahan belanja adalah sebagai berikut:

Program	Jumlah Anggaran (Rp)	
	Semula	Menjadi
Program Dukungan	29.921.273.000	29.567.160.000
Program Pengawasan Pembangunan	3.279.602.000	3.631.405.000
Total	33.200.875.000	33.198.565.000

Pendapatan Negara dan Hibah
Rp21.507.501,00

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Semester I Tahun 2023 adalah sebesar Rp21.507.501,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Realisasi PNBP Semester I Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar Rp50.759.300,00 atau 29,76 persen dibandingkan realisasi PNBP Semester I Tahun 2022 sebesar Rp72.266.801,00 disebabkan adanya Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain tahun 2022.

Perbandingan realisasi PNBP Semester I Tahun 2023 dan 2022 disajikan



pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Perbandingan Realisasi PNBP Semester I Tahun 2023 dan 2022

Uraian Jenis PNBP	Realisasi PNBP (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2023	TA 2022	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	17.041.971	17.708.618	(666.647)	(3,76)
Pendapatan penyelesaian Ganti Kerugian Negara	0	53.474.407	(53.474.407)	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	4.465.530	1.083.776	3.381.754	312,03
Total	21.507.501	72.266.801	(50.759.300)	(70,24)

Belanja Negara
Rp17.059.354.752,00

B.2. Belanja Negara

Realisasi belanja Semester I Tahun 2023 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah sebesar Rp17.059.354.752,00 atau 51,39 persen dari anggaran sebesar 33.198.565.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja menurut program Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program Tahun 2023

Kode Prog.	Uraian Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
01	Program Dukungan	29.567.160.000	16.009.404.261	54,16
06	Program Pengawasan Pembangunan	3.631.405.000	1.049.950.491	28,91
Jumlah		33.198.565.000	17.059.354.752	51,39

Sedangkan menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan pada Tabel 3 di bawah ini:

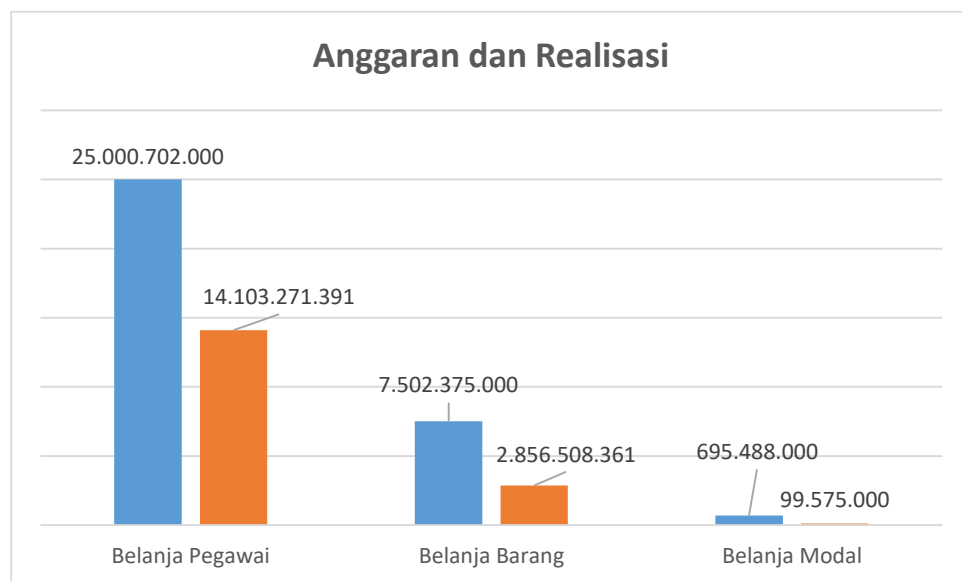


Tabel 3
Rincian Anggaran dan Realisasi per Jenis Belanja
Tahun 2023

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
51	Belanja Pegawai	25.000.702.000	14.103.271.391	56,41
52	Belanja Barang	7.502.375.000	2.856.508.361	38,07
53	Belanja Modal	695.488.000	99.575.000	14,32
	Jumlah	33.198.565.000	17.059.354.752	51,39

Komposisi anggaran dan realisasi belanja disajikan dalam grafik berikut ini:

Grafik 1
Anggaran dan Realisasi Tahun 2023



Realisasi belanja Tahun 2023 mengalami Peningkatan sebesar Rp3.483.514.046,00 atau 25,66% dibandingkan realisasi belanja Tahun 2022 disebabkan penambahan belanja pegawai karena mutasi masuk, bertambahnya kegiatan dan belanja modal tahun 2023.

Perbandingan realisasi belanja Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 4 berikut ini:



Tabel 4
Perbandingan Realisasi Belanja Semester I Tahun 2023 dan 2022

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
		TA 2023	TA 2022	Jumlah (Rp)	%
51	Belanja Pegawai	14.103.271.391	11.492.317.320	2.610.954.071	22,72
52	Belanja Barang	2.856.508.361	2.083.523.386	772.984.975	37,10
53	Belanja Modal	99.575.000	0	99.575.000	~
	Total	17.059.354.752	13.575.840.706	3.483.514.046	25,66

Belanja Pegawai
Rp14.103.271.391,00

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Semester I Tahun 2023 dan 2022 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp14.103.271.391,00 dan Rp11.492.317.320,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Semester I Tahun 2023 disajikan pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel 5
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Aemester I Tahun 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	11.682.766.000	6.575.000.635	56,28
Belanja Lembur	343.152.000	56.781.000	16,55
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	12.974.784.000	7.471.489.756	57,58
Total	25.000.702.000	14.103.271.391	56,41

Realisasi belanja pegawai (*netto*) sebesar Rp14.103.271.391,00 berasal dari belanja pegawai (*bruto*) sebesar Rp14.105.988.163,00 setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp2.716.772,00.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, terdapat kenaikan realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp2.610.954.071,00 atau 22,72 persen disebabkan mutasi pegawai.

Perbandingan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 6 berikut ini:



Tabel 6
Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai
Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2023	TA 2022	Jumlah (Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	6.575.000.635	5.461.146.908	1.113.853.727	20,40
Belanja Lembur	56.781.000	117.625.000	(60.844.000)	(51,73)
Belanja Tunjangan Khusus/Kegiatan	7.471.489.756	5.913.545.412	1.557.944.344	26,35
Total	14.103.271.391	11.492.317.320	2.610.954.071	22,72

Belanja Barang
Rp2.856.508.361,00

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 dan 2022 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp2.856.508.361,00 dan Rp2.083.523.386,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang Tahun 2023 disajikan pada Tabel 7 berikut ini:

Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang
Semester I Tahun 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	1.567.511.000	801.404.121	51,13
Belanja Barang Non Operasional	262.540.000	27.440.900	10,45
Belanja Barang Persediaan	323.830.000	63.623.680	19,65
Belanja Jasa	754.340.000	364.654.632	48,34
Belanja Pemeliharaan	729.194.000	334.389.495	45,86
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.864.960.000	1.264.995.533	32,73
Total	7.502.375.000	2.856.508.361	38,07

Realisasi belanja barang (*netto*) sebesar Rp2.856.508.361,00 berasal dari belanja barang (*bruto*) sebesar Rp2.856.508.361,00 dikurangi pengembalian belanja barang sebesar Rp0,00.

Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, terdapat kenaikan realisasi Belanja Barang sebesar Rp772.984.975,00 atau 37,10 persen dari total belanja barang tahun 2022 senilai Rp2.083.523.386,00 antara lain disebabkan bertambahnya kegiatan



kantor di tahun 2023.

Perbandingan realisasi Belanja Barang Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja Barang
Semester I Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2023	TA 2022	Jumlah (Rp)	%
Belanja Barang Operasional	801.404.121	702.885.968	98.518.153	14,02
Belanja Barang Non Operasional	27.440.900	34.928.750	(7.487.850)	(21,44)
Belanja Barang Persediaan	63.623.680	160.056.398	(96.432.718)	(60,25)
Belanja Jasa	364.654.632	301.378.690	63.275.942	21,00
Belanja Pemeliharaan	334.389.495	293.442.926	40.946.569	13,95
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.264.995.533	590.830.654	674.164.879	114,10
Total	2.856.508.361	2.083.523.386	772.984.975	37,10

*Belanja Modal Rp
Rp99.575.000,00*

B.2.3. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Semester I Tahun 2023 dan 2022 setelah dikurangi pengembalian belanja masing-masing sebesar Rp99.575.000,00 dan Rp0,00.

Rincian anggaran dan realisasi Belanja Modal Tahun 2023 disajikan pada Tabel 9 berikut ini:

Tabel 9
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Semester I Tahun 2023

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
Belanja Modal	695.488.000	99.575.000	14,32
Total	695.488.000	99.575.000	14,32

Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, terdapat kenaikan realisasi belanja modal sebesar ~%.

Perbandingan realisasi Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 10 berikut ini:



Tabel 10
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester I Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi Belanja Netto (Rp)		Naik / (Turun)	
	TA 2023	TA 2022	Jumlah (Rp)	%
Belanja Modal	99.575.000	0	99.575.000	~
Total	99.575.000	0	99.575.000	~



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp381.222.271,00

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp381.222.271,00 dan Rp310.955.059,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 12 berikut ini:

Tabel 12
Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

No	Aset Lancar	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	120.000.000	0
2	Piutang Lainnya	2.918.896	0
3	Persediaan	258.303.375	310.955.059
	Total	381.222.271	310.955.059

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp120.000.000,00

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran.

Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp120.000.000,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023

No	Aset Lancar	30 Juni 2023 (Rp)
1	Uang Tunai di Brankas	0
2	Uang di Rekening Bank	51.167.561
3	Uang Muka/Vouhher	0
4	Kuitansi UP belum diSPJ-kan	68.832.439
5	Selisih Kas	0
	Total	120.000.000

Piutang bukan pajak
Rp2.918.896,00

C.1.2. Piutang bukan pajak

Piutang bukan pajak per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp2.918.896,00 dan Rp0,00.

Piutang bukan pajak tersebut merupakan pendapatan sewa rumah dinas yang telah dibuat SPM bulan Juni 2023 dan SP2D terbit tanggal 1 Juli 2023.

Persediaan
Rp258.303.375,00

C.1.3. Persediaan

Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp258.303.375,00 dan Rp310.955.059,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau



perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 13 berikut ini:

Tabel 13
Rincian Persediaan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Jenis Persediaan	30 Juni 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
Barang Konsumsi	227.150.087	271.562.423
Bahan Untuk Pemeliharaan	13.321.193	12.767.916
Persediaan Lainnya	17.832.095	26.624.720
Jumlah	258.303.375	310.955.059

Dari keseluruhan persediaan pada Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta sebesar Rp258.303.375,00, terdapat persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp12.066.882,00 dengan rincian sebagai berikut:

Nama Barang	Nilai (Rp)
Obat-obatan Covid-19 sebanyak 5.645 tablet	12.066.882
Jumlah	12.066.882

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap
Rp112.008.673.778,00

C.2. Aset Tetap

Nilai buku Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp112.008.673.778,00 dan Rp112.496.141.231,00, yang merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 13 berikut ini:

Tabel 14
Rincian Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	31 Des 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Tanah	95.737.627.000	95.737.627.000
2	Peralatan dan Mesin	15.341.768.913	15.242.193.913
3	Gedung dan Bangunan	19.166.563.800	19.166.563.800
4	Aset Tetap Lainnya	141.551.981	141.551.981



Nilai Perolehan		130.387.511.694	130.287.936.694
5	Akumulasi Penyusutan	(18.378.837.916)	(17.791.795.463)
Nilai Buku		112.008.673.778	112.496.141.231

Tanah
Rp95.737.627.000,00

C.2.1. Tanah

Tanah yang dimiliki BPKP per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp95.737.627.000,00.

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	95.737.627.000
Mutasi Tambah:	
Mutasi Kurang:	
Nilai Buku per 30 Juni 2023	95.737.627.000

Peralatan dan Mesin
Rp15.341.768.913,00

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp15.341.768.913,00 dan Rp15.242.193.913,00. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2023 sebesar Rp14.408.800.983,00 sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp932.967.930,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	15.242.193.913
Mutasi Tambah:	
- Pembelian	99.575.000
Mutasi Kurang:	
Nilai Perolehan per 30 Juni 2023	15.341.768.913
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(14.408.800.983)
Nilai Buku per 31 Desember 2022	932.967.930

Pembelian peralatan dan mesin tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Kelompok Barang	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	Meja kerja kayu	12	78.705.000
2	Laci Box	19	20.870.000
Jumlah			99.575.000



C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp19.166.563.800,00

Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp19.166.563.800,00. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2023 sebesar Rp3.963.761.933,00, sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah Rp15.202.801.867,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	19.166.563.800
Mutasi Tambah:	
Mutasi Kurang:	
Nilai Perolehan per 30 Juni 2023	19.166.563.800
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(3.963.761.933)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	15.202.801.867

C.2.4. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp141.551.981,00

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp141.551.981,00 yang merupakan Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 sebesar Rp6.275.000,00, sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp135.276.981,00.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	141.551.981
Mutasi Tambah:	
Mutasi Kurang:	
Nilai Perolehan per 30 Juni 2023	141.551.981
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(6.275.000)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	135.276.981

Rincian Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	35.154.981	(6.275.000)	28.879.981
2	Kartografi, Naskah dan Lukisan	222.000	0	222.000



3	Barang Bercorak Kesenian	106.175.000	0	106.175.000
	Total	141.551.981	(6.275.000)	135.276.981

**Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap**
(Rp18.378.837.916,00)

C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp18.378.837.916,00 dan Rp17.791.795.463,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan KDP.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023 disajikan pada Tabel 15 berikut ini:

Tabel 15
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023

No	Uraian	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
1	Tanah	95.737.627.000	0	95.737.627.000
2	Peralatan dan Mesin	15.341.768.913	14.408.800.983	932.967.930
3	Gedung dan Bangunan	19.166.563.800	3.963.761.933	15.202.801.867
4	Aset Tetap Lainnya	141.551.981	6.275.000	135.276.981
	Total	130.387.511.694	18.378.837.916	112.008.673.778

Perbandingan mutasi akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan Semester I Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Saldo per 31/12/2022 (Rp)	Saldo per 30/06/2023 (Rp)	Mutasi (Rp)	Beban Penyusutan (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)	(6)	(7) = (6) - (5)
1	Peralatan dan Mesin	14.155.010.583	14.408.800.983	253.790.400	253.573.088	217.312
2	Gedung dan Bangunan	3.630.509.880	3.963.761.933	333.252.053	333.252.053	0
3	Aset Tetap Lainnya	6.275.000	6.275.000	0	0	0
	Total	17.791.795.463	18.378.837.916	587.042.453	586.825.141	217.312

Selisih sebesar Rp217.312,00 antara akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan disebabkan reklas di aplikasi sakti modul aset tetap.



C.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya Rp0,00

Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,00, merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Rincian Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 16 berikut ini:

Tabel 16
Rincian Aset Lainnya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	30 Juni 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Aset Tak Berwujud		
	Nilai Perolehan	93.366.000	93.366.000
2	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	(93.366.000)	(93.366.000)
	Nilai Buku	0	0

Aset Tak Berwujud
Rp93.366.000,00

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp93.366.000,00. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2023 sebesar Rp93.366.000,00. sehingga nilai buku pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik, yang digunakan untuk menunjang operasional kantor, berupa *Software* dan lisensi.

Mutasi nilai Aset Tak Berwujud dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2022	93.366.000
Mutasi Tambah:	
Mutasi Kurang:	
Nilai Perolehan per 30 Juni 2023	93.366.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2023	(93.366.000)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	0

Tidak ada Mutasi tambah/kurang Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2023.

Kewajiban Jangka
Pendek
Rp2.394.236.826,00

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp2.394.236.826,00 dan Rp54.126.313,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.



Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 17 berikut ini:

Tabel 17
Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

No	Uraian	30 Juni 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	2.200.669.987	51.794.313
2	Pendapatan Diterima Dimuka	1.060.000	2.332.000
3	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	72.506.839	0
4	Uang Muka dari KPPN	120.000.000	0
	Total	2.394.236.826	54.126.313

*Utang Kepada Pihak
Ketiga
Rp2.200.669.987,00*

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp2.200.669.987,00 dan Rp51.794.313,00. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan pada Tabel 18 berikut ini:

Tabel 18
**Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga
per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022**

No	Uraian	30 Juni 2023 (Rp)	31 Des 2022 (Rp)
1	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar (Gaji dan Tukun bulan Juli 2023)	2.133.559.987	0
2	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar (Honor PPNPN bulan Juli 2023)	67.110.000	51.794.313
	Total Utang Kepada Pihak Ketiga	2.200.669.987	51.794.313

*Pendapatan
Diterima Dimuka
Rp1.060.000,00*

C.4.2. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp1.060.000,00 dan Rp2.332.000,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pengakuan kewajiban perhitungan akrual per tanggal Neraca atas pendapatan dari transaksi sewa Barang Milik Negara (BMN) yang diterima terlebih dahulu. Rincian Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 disajikan berikut ini:

**Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2023
dan 31 Desember 2022**

No	Uraian	30 Juni 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Sewa Ruang Kantin diterima Dimuka	150.000	330.000
2	Sewa Ruang Koperasi diterima Dimuka	910.000	2.002.000
	Total Pendapatan Diterima di Muka	1.060.000	2.332.000



*Utang Yang Belum
Diterima Tagihannya
Rp72.506.839,00*

C.4.3. Utang Yang Belum Diterima Tagihannya

Utang Yang Belum Diterima Tagihannya per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp72.506.839,00 dan Rp0,00.

Utang Yang Belum Diterima Tagihannya adalah nilai SPBy yang belum di-SPP-kan per 30 Juni 2023

*Uang Muka dari
KPPN
Rp120.000.000,00*

C.4.4. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp120.000.000,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan uang muka yang diberikan kepada Bendaharawan.

*Ekuitas
Rp109.995.659.223,00*

C.5. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban. Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp109.995.659.223,00 dan Rp112.752.969.977,00. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Surplus/(Defisit) dari
Kegiatan Operasional
(Rp19.799.406.223,00)*

D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Semester I Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar minus Rp19.799.406.223,00 dan minus Rp16.107.719.248,00. Jumlah Tahun 2023 tersebut merupakan selisih antara Pendapatan Operasional sebesar Rp21.232.867,00 dikurangi dengan Beban Operasional sebesar Rp19.820.639.090,00.

*Pendapatan
Operasional
Rp21.232.867,00*

D.1.1. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional Semester I Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp21.232.867,00 dan Rp21.829.785,00. Jumlah tersebut seluruhnya merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

*Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp21.232.867,00*

D.1.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp21.232.867,00 dan Rp21.829.785,00. Penurunan PNBP tersebut dikarenakan penurunan jumlah rumah dinas yang ditempati.

Rincian PNBP Semester I Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 20 berikut ini:

Tabel 19
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
Semester I Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	21.232.867	21.829.785	(596.918)	2,73
Total	21.232.867	21.829.785	(596.918)	2,73

Jika realisasi Semester I Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp4.190.896,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 21 berikut ini:



Tabel 20
Perbandingan Realisasi Pendapatan Operasional
Semester I Tahun 2023 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	21.232.867	17.041.971	4.190.896
Total	21.232.867	17.041.971	4.190.896

Selisih Pendapatan Operasional menurut LO dan LRA sebesar Rp4.190.896,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai (Rp)
Pendapatan Sewa diterima dimuka atas koperasi dan kantin yang diterima pembayarannya tahun 2022 baru diakui sebagai pendapatan tahun 2023	1.272.000
Pendapatan sewa rumah dinas bulan Juni 2023 yang penerimaannya diterima pada gaji bulan juli 2023	2.918.896
Total	4.190.896

Beban Operasional
Rp19.820.639.090,00

D.1.2. Beban Operasional

Jumlah Beban Operasional Semester I Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp19.820.639.090,00 dan Rp16.129.549.033,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional. Rincian Beban Operasional Semester I Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 21 berikut ini:

Tabel 21
Rincian Beban Operasional Semester I Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Pegawai	16.236.831.378	13.252.586.325	2.984.245.053	22,52
Beban Persediaan	112.687.483	193.267.684	(80.580.201)	(41,69)
Beban Barang dan Jasa	1.218.533.040	1.071.697.181	146.835.859	13,70
Beban Pemeliharaan	347.830.720	338.402.478	9.428.242	2,79
Beban Perjalanan Dinas	1.317.931.328	655.729.654	662.201.674	100,00
Beban Barang utk diserahkan kpd masy	0	263.998	(263.998)	(100,00)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	586.825.141	617.601.713	(30.776.572)	(4,98)
Total	19.820.639.090	16.129.549.033	3.691.090.057	22,88



D.1.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp16.236.831.378,00

Jumlah Beban Pegawai Semester I Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp16.236.831.378,00 dan Rp13.252.586.325,00. Kenaikan Beban Pegawai tersebut dikarenakan penambahan pegawai.

Rincian Beban Pegawai Semester I Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 22 berikut ini:

Tabel 22
Rincian Beban Pegawai Semester I Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	7.335.810.241	6.784.088.004	551.722.237	8,13
Beban Lembur	56.781.000	117.625.000	(60.844.000)	(51,73)
Beban Tunjangan Khusus/Kegiatan	8.844.240.137	6.350.873.321	2.493.366.816	39,26
Total	16.236.831.378	13.252.586.325	2.984.245.053	22,52

Jika realisasi LO Semester I Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp2.133.559.987,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 23 berikut ini:

Tabel 23
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pegawai Semester I Tahun 2023 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Gaji dan Tunjangan PNS	7.335.810.241	6.575.000.635	760.809.606
Beban Lembur	56.781.000	56.781.000	0
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito	8.844.240.137	7.471.489.756	1.372.750.381
Total	16.236.831.378	14.103.271.391	2.133.559.987

Selisih realisasi menurut LO dan LRA sebesar Rp2.133.559.987,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:



Uraian	Nilai (Rp)
Gaji bulan Juli 2023 yg dibayarkan tanggal 1 Juli 2023	760.809.606
Tunkin bln Juli 2023 yg dibayarkan tanggal 1 Juli 2023	1.372.750.381
Total	2.133.559.987

Beban Persediaan
Rp112.687.483,00

D.1.2.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Semester I Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp112.687.483,00 dan Rp193.267.684,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat pemakaian/konsumsi atas barang-barang yang habis pakai. Kenaikan Beban Persediaan tersebut dikarenakan kenaikan volume kebutuhan kantor.

Rincian Beban Persediaan Semester I Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 24 berikut ini:

Tabel 24
Rincian Beban Persediaan Semester I Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Persediaan Konsumsi	96.080.258	88.686.699	7.393.559	8,34
Beban Persediaan Bahan Baku	0	3.421.170	(3.421.170)	(100,00)
Beban Persediaan Lainnya	16.607.225	101.159.815	(84.552.590)	(83,58)
Total	112.687.483	193.267.684	(80.580.201)	(41,69)

Realisasi Belanja Barang Persediaan Semester I Tahun 2023 menurut Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp63.623.680,00, sedangkan beban Persediaan menurut Laporan Operasional sebesar Rp112.687.483,00. Perbedaan tersebut disebabkan Belanja Barang Persediaan dicatat sebagai perolehan Persediaan di Neraca, sedangkan Beban Persediaan merupakan pemakaian Persediaan selama Semester I Tahun 2023.



**Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Persediaan
Tahun 2022 Menurut LO dan LRA**

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Persediaan konsumsi	96.080.258	0	96.080.258
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	16.607.225	0	16.607.225
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	56.319.080	(56.319.080)
Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	7.304.600	(7.304.600)
	112.687.483	63.623.680	49.063.803

**Beban Barang dan
Jasa**
Rp1.218.533.040,00

D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Semester I Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.218.533.040,00 dan Rp 1.071.697.181,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Penurunan Beban Barang dan Jasa tersebut dikarenakan penurunan kebutuhan dan beban kerja.

Rincian Beban Barang dan Jasa Semester I Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 25 berikut ini:

Tabel 25
Rincian Beban Barang dan Jasa Semester I Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Barang Operasional	870.089.321	772.182.109	97.907.212	12,68
Beban Barang Non Operasional	27.440.900	35.217.150	(7.776.250)	(22,08)
Beban Jasa	321.002.819	264.297.922	56.704.897	21,45
Total	1.218.533.040	1.071.697.181	146.835.859	13,70

Jika realisasi LO Semester I Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama,



terdapat selisih sebesar Rp25.033.387,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 27 berikut ini:

Tabel 26
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Barang Operasional	870.089.321	801.404.121	68.685.200
Beban Barang Non Operasional	27.440.900	27.440.900	0
Beban Jasa	321.002.819	364.654.632	(43.651.813)
Total	1.218.533.040	1.193.499.653	25.033.387

Selisih realisasi Beban Jasa sebesar Rp25.033.387,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Beban Gaji PPNPN bulan Juni 2023 yang dibayarkan Juli 2023	67.110.000
Pengadaan ATK yg di-SPBy-kan Juni 2023 namun SP2Dnya terbit bulan Juli 2023	1.575.200
Beban Listik, air dan telepon bulan Desember 2022 yang dibayarkan Januari 2023	(43.651.813)
Total	25.033.387

Beban
Pemeliharaan
Rp347.830.720,00

D.1.2.4. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan Semester I Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp347.830.720,00 dan Rp338.402.478,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Kenaikan Beban Pemeliharaan tersebut dikarenakan kenaikan kebutuhan pemeliharaan.

Rincian Beban Pemeliharaan Semester I Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 27 berikut ini:

Tabel 27
Rincian Beban Pemeliharaan Semester I Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	168.747.342	148.049.707	20.697.635	13,98
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	169.767.153	185.061.476	(15.294.323)	(8,26)
Beban Persediaan Pemeliharaan	9.316.225	5.291.295	4.024.930	76,07
Total	347.830.720	338.402.478	9.428.242	2,79



Jika realisasi LO Semester I Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih sebesar Rp13.441.225,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 28 berikut ini:

Tabel 28
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pemeliharaan
Tahun 2023 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	168.747.342	168.622.342	125.000
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	169.767.153	165.767.153	4.000.000
Beban Persediaan Pemeliharaan	9.316.225	0	9.316.225
Total	347.830.720	334.389.495	13.441.225

Realisasi Belanja Persediaan Pemeliharaan Tahun 2023 menurut Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp334.389.495,00, sedangkan menurut Laporan Operasional sebesar Rp347.830.720,00. Perbedaan Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan serta Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin terjadi karena dalam pemeliharaan Semester I tahun 2023 sebagian bahan/peralatan yang digunakan atas pengadaan tahun 2022.

Beban Perjalanan

Dinas

Rp1.317.931.328,00

D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Semester I Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.317.931.328,00 dan Rp655.729.654,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Kenaikan Beban Perjalanan Dinas tersebut dikarenakan bertambahnya kegiatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 29 berikut ini:



Tabel 29
Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester I Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Perjalanan Biasa	1.279.211.328	513.881.583	765.329.745	148,93
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	38.720.000	44.690.000	(5.970.000)	(13,36)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	97.158.071	(97.158.071)	(100,00)
Total	1.317.931.328	655.729.654	662.201.674	100,99

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Semester I Tahun 2023 menurut Laporan Realisasi Anggaran pada periode yang sama adalah sebesar Rp 1.264.995.533,00. selisih sebesar Rp52.935.795,00 yang merupakan beban perjalanan dinas yang sudah di-SPP-kan namun belum terbit Sp2D-nya.

*Beban Barang
untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat
Rp0,00*

D.1.2.6. Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Semester I Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp263.998,00

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp586.825.141,00*

D.1.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester I Tahun 2023 dan 2022 sebesar Rp586.825.141,00 dan 617.601.713,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 30 berikut ini:

Tabel 30
**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Semester I Tahun 2023 dan 2022**

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	253.573.088	272.678.910	(19.105.822)	(7,01)



Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	333.252.053	333.252.053	0	0
Beban Amortisasi Software	0	11.670.750	(11.670.750)	(100,00)
Total	586.825.141	617.601.713	(30.776.572)	(4,98)

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
Rp4.465.530,00

D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Semester I Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.465.530,00 dan Rp54.558.183,00. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Semester I Tahun 2023 sebesar Rp4.465.530,00 tersebut merupakan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp4.465.530,00.

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp4.465.530,00

D.2.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.465.530,00 dan Rp54.558.183,00. Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp4.465.530,00 merupakan selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp4.465.530,00 dikurangi Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya sebesar Rp0,00.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp4.465.530,00

D.2.2.1. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp4.465.530,00 dan Rp54.558.183,00. Penurunan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya tersebut dikarenakan Tahun 2022 terdapat pendapatan penyelesaian ganti rugi kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I Tahun 2023 dan 2022 disajikan pada Tabel 32 berikut ini:



Tabel 32
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Semester I Tahun 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi (Rp)		Naik / (Turun)	
	Tahun 2023	Tahun 2022	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan Penyel. Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai	0	53.474.407	(53.474.407)	~
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	4.465.530	1.083.776	3.381.754	312,03
	4.465.530	54.558.183	(50.092.653)	(91,82)

Jika realisasi Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya Semester I Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi menurut LRA pada periode yang sama, masing-masing sebesar Rp4.465.530,00 sebagaimana disajikan pada Tabel 33 berikut ini:

Tabel 33
Perbandingan Realisasi Pendapatan Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2022 Menurut LO dan LRA

Uraian	Realisasi Menurut		Selisih (Rp)
	LO (Rp)	LRA (Rp)	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	4.465.530	4.465.530	0
Total	4.465.530	4.465.530	0



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp112.752.969.977,00

E.1. Ekuitas Awal

Jumlah Ekuitas Awal per 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp112.752.969.977,00 dan Rp113.762.937.483,00.

Surplus/(Defisit) LO
(Rp19.794.940.693,00)

E.2. Surplus/(Defisit) LO

Jumlah Surplus/(Defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar minus Rp19.794.940.693,00 dan minus Rp16.053.161.065,00. Jumlah tersebut merupakan selisih kurang pendapatan dibandingkan dengan beban sebagaimana telah dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.

Koreksi yang Menambah (Mengurangi) Nilai Ekuitas
(Rp217.312,00)

E.3. Koreksi yang Menambah (Mengurangi) Nilai Ekuitas

Koreksi yang Menambah (Mengurangi) Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 2022 adalah sebesar minus Rp217.312,00 dan minus Rp0,00. Jumlah tersebut merupakan selisih akibat reklas keluar dan reklas masuk peralatan dan mesin di aplikasi sakti modul aset tetap..

Transaksi Antar Entitas
Rp17.037.847.251,00

E.4. Transaksi Antar Entitas

Jumlah Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp17.037.847.251,00 dan Rp13.503.573.905,00. Jumlah Transaksi Antar Entitas per 30 Juni 2023 dan 2022, terdiri atas:

Uraian	30 Juni 2023 (Rp)	30 Juni 2022 (Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	17.059.354.752	13.575.840.706
Diterima dari Entitas Lain	(21.507.501)	(72.266.801)
Total	17.037.847.251	13.503.573.905

Ditagihkan ke Entitas Lain
Rp17.059.354.752,00

E.3.1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp17.059.354.752,00 dan Rp13.575.840.706,00. Jumlah per 30 Juni 2023 merupakan realisasi belanja yang telah diterima pembayarannya dari Kas Negara setelah dikurangi pengembalian belanja sampai



dengan 30 Juni 2023.

*Diterima dari Entitas
Lain
Rp21.507.501,00*

E.3.2. Diterima dari Entitas Lain

Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 30 Juni 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp21.507.501,00 dan Rp72.266.801,00. Jumlah per 30 Juni 2023 merupakan realisasi penerimaan negara yang telah disetorkan ke Kas Negara setelah dikurangi pengembalian pendapatan sampai dengan 30 Juni 2023.

*Ekuitas Akhir
Rp109.995.659.223,00*

E.5. Ekuitas Akhir

Jumlah Ekuitas per 30 Juni 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp109.995.659.223,00 dan Rp111.213.350.323,00. Jumlah per 30 Juni 2023 merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca yaitu selisih antara nilai Aset sebesar Rp112.389.896.049,00 dikurangi nilai Kewajiban sebesar Rp2.394.236.826,00.



F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

*Biaya Bantuan
Kedinasan
Rp118.442.500,00*

F.1. Informasi Biaya Bantuan Kedinasan

Selama Semester I Tahun 2023 kegiatan pengawasan Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta dibiayai dari DIPA Perwakilan BPKP D.I. Yogyakarta dan sebagian kecil dibiayai oleh mitra dengan total nilai Rp118.442.500,00 dengan rincian per bidang sebagai berikut:

No.	Bidang	Penugasan		
		Jumlah Penugasan	Jumlah Laporan	Rupiah (Rp)
1	IPP	1	1	22.152.500
2	APD	0	0	0
3	AN	7	7	96.290.000
4	Investigasi	0	0	0
5	P3A	0	0	0
Jumlah		8	8	118.442.500

Seluruh pertanggungjawaban penugasan pengawasan yang dibiayai oleh mitra dipertanggungjawabkan oleh mitra kerja sesuai dengan mekanisme yang diberlakukan pada mitra kerja. Perwakilan BPKP DI Yogyakarta hanya menerbitkan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Nihil dengan metode pembayaran setelah pegawai selesai penugasan atau saat laporan telah selesai diberikan kepada mitra kerja.



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 089
ESELON I : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 01
SATUAN KERJA : PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA 450536

Tgl Data : 04/07/23 6:00 AM
Tgl Cetak : 04/07/23 8:06 AM
Halaman : 2
lap_ira_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	33,198,565,000	17,059,354,752	16,139,210,248	51	31,185,165,000	13,575,840,706	17,609,324,294	54
C	PEMBIAYAAN				0				0

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Yogyakarta, 4 Juli 2023
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Adi Gemawan
196508271986031001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089 **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**
ESELON I : 01 **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**
WILAYAH/PROVINSI : 0400 **DI YOGYAKARTA**
SATUAN KERJA : 450536 **PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 06/07/23 8:02 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251 425131	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	39,593,000	17,041,971	0	17,041,971	43.04
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	39,593,000	17,041,971	0	17,041,971	43.04
4259 425911	Pendapatan Lain-Lain Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,465,530	0	4,465,530	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	4,465,530	0	4,465,530	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	39,593,000	21,507,501	0	21,507,501	54.32
	JUMLAH PENDAPATAN	39,593,000	21,507,501	0	21,507,501	54.32

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0400
SATUAN KERJA : 450536
JENIS SATUAN KERJA : KD

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DI YOGYAKARTA
PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/07/23 8:02 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 6/7/23 6:40 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	7,520,209,000	7,790,497,000	4,716,596,900	0	4,716,596,900	60.54	3,073,900,100
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	105,000	105,000	68,596	92	68,504	65.33	36,496
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	529,396,000	529,396,000	320,375,410	0	320,375,410	60.52	209,020,590
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	154,691,000	154,691,000	77,472,766	0	77,472,766	50.08	77,218,234
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	85,820,000	85,820,000	36,080,000	0	36,080,000	42.04	49,740,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	979,498,000	979,498,000	694,722,000	500,000	694,222,000	70.93	285,276,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	205,394,000	205,394,000	45,808,515	0	45,808,515	22.3	159,585,485
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	838,511,000	838,511,000	223,560,540	0	223,560,540	26.66	614,950,460
511129	Belanja Uang Makan PNS	1,059,576,000	1,026,404,000	428,481,000	0	428,481,000	41.75	597,923,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	72,450,000	72,450,000	32,520,000	185,000	32,335,000	44.89	40,115,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	11,445,650,000	11,682,766,000	6,575,685,727	685,092	6,575,000,635	56.29	5,107,765,365
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	343,152,000	343,152,000	56,781,000	0	56,781,000	16.55	286,371,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	343,152,000	343,152,000	56,781,000	0	56,781,000	16.55	286,371,000
5124	Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transit							
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	14,161,501,000	12,974,784,000	7,473,521,436	2,031,680	7,471,489,756	57.6	5,503,294,244
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124	14,161,501,000	12,974,784,000	7,473,521,436	2,031,680	7,471,489,756	57.6	5,503,294,244
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	25,950,303,000	25,000,702,000	14,105,988,163	2,716,772	14,103,271,391	56.42	10,897,430,609
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,248,749,000	1,280,574,000	694,021,990	0	694,021,990	54.2	586,552,010
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	24,000,000	24,000,000	10,227,903	0	10,227,903	42.62	13,772,097
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	215,160,000	203,976,000	75,640,000	0	75,640,000	37.08	128,336,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	48,961,000	58,961,000	21,514,228	0	21,514,228	36.49	37,446,772
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,536,870,000	1,567,511,000	801,404,121	0	801,404,121	51.13	766,106,879
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	127,770,000	134,370,000	14,267,900	0	14,267,900	10.62	120,102,100
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	90,270,000	98,170,000	12,650,000	0	12,650,000	12.89	85,520,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	30,000,000	30,000,000	523,000	0	523,000	1.74	29,477,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	248,040,000	262,540,000	27,440,900	0	27,440,900	10.45	235,099,100
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	299,174,000	309,730,000	56,319,080	0	56,319,080	18.18	253,410,920

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 089
ESELON I : 01
WILAYAH/PROVINSI : 0400
SATUAN KERJA : 450536
JENIS SATUAN KERJA : KD

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DI YOGYAKARTA
PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/07/23 8:02 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
Tgl Data : 6/7/23 6:40 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	10,000,000	14,100,000	7,304,600	0	7,304,600	51.81	6,795,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	309,174,000	323,830,000	63,623,680	0	63,623,680	19.65	260,206,320
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	510,000,000	510,000,000	302,156,838	0	302,156,838	59.25	207,843,162
522112	Belanja Langganan Telepon	60,000,000	60,000,000	1,863,166	0	1,863,166	3.11	58,136,834
522113	Belanja Langganan Air	3,840,000	3,840,000	790,800	0	790,800	20.59	3,049,200
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	36,000,000	36,000,000	20,776,318	0	20,776,318	57.71	15,223,682
522141	Belanja Sewa	100,800,000	100,800,000	36,067,510	0	36,067,510	35.78	64,732,490
522151	Belanja Jasa Profesi	39,200,000	43,700,000	3,000,000	0	3,000,000	6.86	40,700,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	749,840,000	754,340,000	364,654,632	0	364,654,632	48.34	389,685,368
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	385,440,000	365,124,000	168,622,342	0	168,622,342	46.18	196,501,658
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	15,000,000	15,000,000	0	0	0	0	15,000,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	292,070,000	323,830,000	165,767,153	0	165,767,153	51.19	158,062,847
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	60,000,000	25,240,000	0	0	0	0	25,240,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	752,510,000	729,194,000	334,389,495	0	334,389,495	45.86	394,804,505
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	2,251,943,000	3,411,059,000	1,226,275,533	0	1,226,275,533	35.95	2,184,783,467
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,292,195,000	443,901,000	38,720,000	0	38,720,000	8.72	405,181,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	3,554,138,000	3,864,960,000	1,264,995,533	0	1,264,995,533	32.73	2,599,964,467
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	7,150,572,000	7,502,375,000	2,856,508,361	0	2,856,508,361	38.07	4,645,866,639
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100,000,000	100,000,000	99,575,000	0	99,575,000	99.58	425,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	100,000,000	100,000,000	99,575,000	0	99,575,000	99.58	425,000
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	595,488,000	0	0	0	0	595,488,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	0	595,488,000	0	0	0	0	595,488,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	100,000,000	695,488,000	99,575,000	0	99,575,000	14.32	595,913,000
	JUMLAH BELANJA	33,200,875,000	33,198,565,000	17,062,071,524	2,716,772	17,059,354,752	51.39	16,139,210,248

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (450536) PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA

Tgl Data : 04/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 04/07/23 7:42 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	120,000,000	0	120,000,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	2,918,896	0	2,918,896	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	2,918,896	0	2,918,896	0.00
Persediaan	258,303,375	310,955,059	(52,651,684)	(16.93)
JUMLAH ASET LANCAR	381,222,271	310,955,059	70,267,212	22.60
ASET TETAP				
Tanah	95,737,627,000	95,737,627,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	15,341,768,913	15,242,193,913	99,575,000	0.65
Gedung dan Bangunan	19,166,563,800	19,166,563,800	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	141,551,981	141,551,981	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(18,378,837,916)	(17,791,795,463)	(587,042,453)	3.30
JUMLAH ASET TETAP	112,008,673,778	112,496,141,231	(487,467,453)	(0.43)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	93,366,000	93,366,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(93,366,000)	(93,366,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	112,389,896,049	112,807,096,290	(417,200,241)	(0.37)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	2,200,669,987	51,794,313	2,148,875,674	4,148.86
Utang Yang Belum Ditagihkan	72,506,839	0	72,506,839	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	1,060,000	2,332,000	(1,272,000)	(54.55)
Uang Muka dari KPPN	120,000,000	0	120,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2,394,236,826	54,126,313	2,340,110,513	4,323.42
JUMLAH KEWAJIBAN	2,394,236,826	54,126,313	2,340,110,513	4,323.42
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	109,995,659,223	112,752,969,977	(2,757,310,754)	(2.45)
JUMLAH EKUITAS	109,995,659,223	112,752,969,977	(2,757,310,754)	(2.45)
JUMLAH EKUITAS	109,995,659,223	112,752,969,977	(2,757,310,754)	(2.45)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	112,389,896,049	112,807,096,290	(417,200,241)	(0.37)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (450536) PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA

Tgl Data : 04/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 04/07/23 7:42 AM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Yogyakarta, 4 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Adi Gemawan

196508271986031001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2023
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (450536) PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA

Tgl Data : 04/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 04/07/23 7:38 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	21,232,867	21,829,785	(596,918)	(2.734)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	21,232,867	21,829,785	(596,918)	(2.734)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	21,232,867	21,829,785	(596,918)	(2.734)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	16,236,831,378	13,252,586,325	2,984,245,053	22.518
Beban Persediaan	112,687,483	193,267,684	(80,580,201)	(41.694)
Beban Barang dan Jasa	1,218,533,040	1,071,697,181	146,835,859	13.701
Beban Pemeliharaan	347,830,720	338,402,478	9,428,242	2.786
Beban Perjalanan Dinas	1,317,931,328	655,729,654	662,201,674	100.987
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	263,998	(263,998)	(100)
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (450536) PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA

Tgl Data : 04/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 04/07/23 7:38 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	586,825,141	617,601,713	(30,776,572)	(4.983)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	19,820,639,090	16,129,549,033	3,691,090,057	22.884
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(19,799,406,223)	(16,107,719,248)	(3,691,686,975)	22.919
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4,465,530	54,558,183	(50,092,653)	(91.815)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	4,465,530	54,558,183	(50,092,653)	(91.815)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	4,465,530	54,558,183	(50,092,653)	(91.815)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(19,794,940,693)	(16,053,161,065)	(3,741,779,628)	23.309
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(19,794,940,693)	(16,053,161,065)	(3,741,779,628)	23.309

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Yogyakarta, 4 Juli 2023
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

Adi Gemawan
196508271986031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (450536) PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA

Tgl Data : 04/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 04/07/23 7:42 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	112,752,969,977	113,762,937,483	(1,009,967,506)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(19,794,940,693)	(16,053,161,065)	(3,741,779,628)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	(217,312)	0	(217,312)	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(217,312)	0	(217,312)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	17,037,847,251	13,503,573,905	3,534,273,346	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,757,310,754)	(2,549,587,160)	(207,723,594)	-
EKUITAS AKHIR	109,995,659,223	111,213,350,323	(1,217,691,100)	-

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Yogyakarta, 4 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Adi Gemawan

196508271986031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (450536) PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA

Tgl Data : 04/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 04/07/23 7:43 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	120,000,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	2,918,896	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	227,150,087	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	13,321,193	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	17,832,095	0
0.0	131111	Tanah	95,737,627,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	15,341,768,913	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	19,166,563,800	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	141,551,981	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	14,408,800,983
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	3,963,761,933
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	6,275,000
0.0	162151	Software	93,366,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	93,366,000
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	2,133,559,987
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	67,110,000
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	72,506,839
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	1,060,000
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	120,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	17,059,354,752
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	21,507,501	0
0.0	391111	Ekuitas	0	112,752,969,977
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	217,312	0
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	21,232,867
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,465,530
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	5,301,696,800	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	76,728	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	360,181,950	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	87,496,636	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	40,590,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	781,346,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	47,921,787	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	251,804,340	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	428,481,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	36,215,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	56,781,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	8,844,240,137	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	762,571,990	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (450536) PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA

Tgl Data : 04/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 04/07/23 7:43 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10,227,903	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	75,640,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	21,649,428	0
3.0	521211	Beban Bahan	14,267,900	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	12,650,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	523,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	250,986,271	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,446,920	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	583,300	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	26,178,818	0
3.0	522141	Beban Sewa	37,907,510	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	3,900,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	168,747,342	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	169,767,153	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	1,279,211,328	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	38,720,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	253,573,088	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	333,252,053	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	96,080,258	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	9,316,225	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	16,607,225	0
JUMLAH			150,704,463,868	150,704,463,868

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Yogyakarta, 4 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Adi Gemawan

196508271986031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (450536) PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA

Tgl Data : 04/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 04/07/23 7:43 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	694,021,990	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	523,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	36,067,510	0
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,465,530
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	4,716,596,900	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	694,722,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	32,520,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	38,720,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	14,267,900	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	56,319,080	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	7,304,600	0
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	500,000
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	185,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	17,041,971
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	36,080,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	45,808,515	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	3,000,000	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	320,375,410	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	223,560,540	0
3.0	512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	7,473,521,436	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	1,226,275,533	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	75,640,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	21,514,228	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	12,650,000	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	20,776,318	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	92
3.1	512411	Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0	2,031,680
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	17,059,354,752
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	68,596	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	1,863,166	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	790,800	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	168,622,342	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	165,767,153	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	77,472,766	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	428,481,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99,575,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	56,781,000	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	10,227,903	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (089) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (450536) PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA

Tgl Data : 04/07/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 04/07/23 7:43 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	302,156,838	0
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	21,507,501	0
JUMLAH			17,083,579,025	17,083,579,025

Keterangan :

BELUM FINAL

*) MASIH BELUM DILAKUKAN TUTUP PERIODE

Yogyakarta, 4 Juli 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran

Adi Gemawan

196508271986031001

UAPB : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
UAPPB-E1 : BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
UAPPB-W : KANTOR PUSAT BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

LAPORAN POSISI PERSEDIAAN DI NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 30-06-2023
TAHUN ANGGARAN : 2023

NAMA UAKPB : PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA
KODE UAKPB : 089.01.0400.450536.000.KD

KODE	URAIAN	NILAI
117111	Barang Konsumsi	227,150,087
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	13,321,193
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0
117131	Bahan Baku	0
117141	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	0
117199	Persediaan Lainnya	17,832,095
	Jumlah	258,303,375

Disetujui tanggal : 30-06-2023
Kuasa Pengguna Barang

Yogyakarta, 30-06-2023
Petugas Pengelola Persediaan

Adi Gemawan
196508271986031001

Nuraini Saptanti Dewi
197209031998032001

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2023
TAHUN ANGGARAN 2023**

UAPB : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
UAKPB : 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA

Tgl.Data : 18/07/23 12:00 PM
Tgl.Cetak : 18/07/23 4:24 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	227,150,087
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	13,321,193
117199	Persediaan Lainnya	17,832,095
131111	Tanah	95,737,627,000
132111	Peralatan dan Mesin	15,341,768,913
133111	Gedung dan Bangunan	19,166,563,800
135121	Aset Tetap Lainnya	141,551,981
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(14,408,800,983)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(3,963,761,933)
137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(6,275,000)
162151	Software	93,366,000
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(93,366,000)
J U M L A H		112,266,977,153

Yogyakarta, 31 Desember 2022
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Adi Gemawan
196508271986031001

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL**

**RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**

UAPB : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
UAKPB : 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA

Tgl Data : 18/07/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 18/07/23 4:24 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2023						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
131111	Tanah		17,306	95,737,627,000	0	0	0	0	95,737,627,000
20101	TANAH PERSIL	-	17,306	95,737,627,000	0	0	0	0	95,737,627,000
132111	Peralatan dan Mesin		3,195	15,341,768,913	(14,155,010,583)	(253,790,400)	0	(14,408,800,983)	932,967,930
30103	ALAT BANTU	-	7	685,981,506	(678,906,509)	(1,010,713)	0	(679,917,222)	6,064,284
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	18	1,387,835,500	(1,238,836,924)	(23,809,287)	0	(1,262,646,211)	125,189,289
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	1	1,280,000	(1,280,000)	0	0	(1,280,000)	0
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	-	5	20,822,000	(17,993,800)	(506,600)	0	(18,500,400)	2,321,600
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	1	850,000	(850,000)	0	0	(850,000)	0
30303	ALAT UKUR	-	4	8,590,000	(8,590,000)	0	0	(8,590,000)	0
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	13	23,644,000	(15,490,000)	(2,718,000)	0	(18,208,000)	5,436,000
30501	ALAT KANTOR	-	528	2,538,790,351	(2,474,160,752)	(13,171,800)	0	(2,487,332,552)	51,457,799
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	2,080	5,535,636,630	(5,078,764,710)	(79,281,580)	0	(5,158,046,290)	377,590,340
30601	ALAT STUDIO	-	95	621,226,750	(447,339,724)	(28,010,752)	0	(475,350,476)	145,876,274
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	32	222,618,184	(216,235,072)	(1,841,556)	0	(218,076,628)	4,541,556
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	26	135,281,603	(66,225,103)	(12,505,700)	0	(78,730,803)	56,550,800
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	6	15,607,437	(15,969,625)	362,188	0	(15,607,437)	0
30807	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	-	1	135,827,916	(131,300,319)	(4,527,597)	0	(135,827,916)	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	-	3	1,170,750	(1,170,750)	0	0	(1,170,750)	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	214	3,261,259,495	(3,075,472,060)	(67,186,435)	0	(3,142,658,495)	118,601,000
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	155	639,135,056	(580,213,500)	(19,582,568)	0	(599,796,068)	39,338,988
31503	ALAT SAR	-	3	31,320,000	(31,320,000)	0	0	(31,320,000)	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	2	74,885,147	(74,885,147)	0	0	(74,885,147)	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	1	6,588	(6,588)	0	0	(6,588)	0
133111	Gedung dan Bangunan		45	19,166,563,800	(3,630,509,880)	(333,252,053)	0	(3,963,761,933)	15,202,801,867
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	11	14,623,570,800	(1,963,420,249)	(179,977,762)	0	(2,143,398,011)	12,480,172,789
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	34	4,542,993,000	(1,667,089,631)	(153,274,291)	0	(1,820,363,922)	2,722,629,078
135121	Aset Tetap Lainnya		484	141,551,981	(6,275,000)	0	0	(6,275,000)	135,276,981
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	476	35,154,981	0	0	0	0	35,154,981
60103	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	-	6	222,000	0	0	0	0	222,000
60201	BARANG BERCORAK KESENIAN	-	2	106,175,000	(6,275,000)	0	0	(6,275,000)	99,900,000
JUMLAH			21,030	130,387,511,694	(17,791,795,463)	(587,042,453)	0	(18,378,837,916)	112,008,673,778

Yogyakarta, 31 Desember 2022
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

Adi Gemawan
196508271986031001

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**

UAPB : 089 **BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**
UAKPB : 450536 **PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA**

Tgl Data : 18/07/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 18/07/23 4:24 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2023						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
132111	Peralatan dan Mesin		262	52,852,991	(52,852,991)	0	0	(52,852,991)	0
30501	ALAT KANTOR	-	2	460,000	(460,000)	0	0	(460,000)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	208	45,379,906	(45,379,906)	0	0	(45,379,906)	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	42	5,540,085	(5,540,085)	0	0	(5,540,085)	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	1	200,000	(200,000)	0	0	(200,000)	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	8	1,024,500	(1,024,500)	0	0	(1,024,500)	0
31701	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	-	1	248,500	(248,500)	0	0	(248,500)	0
JUMLAH			262	52,852,991	(52,852,991)	0	0	(52,852,991)	0

Yogyakarta, 31 Desember 2022

Penanggung Jawab UAKPB

Kuasa Pengguna Barang

Adi Gemawan

196508271986031001

**LAPORAN AMORTISASI BARANG KUASA PENGGUNA
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023**

Tgl Data : 18/07/23 12:00 PM

Tanggal : 18/07/23 4:24 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_amor_kel_satker

UAPA : 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
UAKPB : 450536 PERWAKILAN BPKP D.I. YOGYAKARTA

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2023						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	BEBAN AMORTISASI	AKUMULASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7+8	10=5-9
162151	Software		26	93,366,000	(93,366,000)	0	0	(93,366,000)	0
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	26	93,366,000	(93,366,000)	0	0	(93,366,000)	0
JUMLAH			26	93,366,000	(93,366,000)	0	0	(93,366,000)	0